

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam

Khafidhoh¹, Aulia Kiftiah Kencana², Muhammad Alawilhuda³

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

E-Mail: Khafidh202020@gmail.com¹ Aukina3131@gmail.com² radenmashuda45@gmail.com³

Abstract. *One of the areas worked on in school-based management is financing management. Good financing management is necessary because it is believed that with efficient and effective school financial management, errors, leakages, and variations in the use of funds from the original plan and goals will be avoided. Schools are empowered to assess their own needs through school-based financing management, which transfers control over budget allocation and use to schools. To completely reduce dependence on government funding, schools are also allowed to engage in income-generating activities. Financing management needs to be carried out carefully, diligently, and comply with relevant regulations when implementing school-based management. The preparation of school revenue and expenditure budget plans (RAPBS) as well as various forms and sources of school funding are all included in the idea of school-based financing management.*

Keywords: *Management, Financing, School-Based*

Abstrak. Salah satu bidang yang digarap dalam manajemen berbasis sekolah adalah manajemen pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan yang baik diperlukan karena diyakini dengan pengelolaan keuangan sekolah yang efisien dan efektif akan terhindar dari kesalahan, kebocoran, dan variasi penggunaan dana dari rencana dan tujuan awal. Sekolah diberi wewenang untuk menilai kebutuhan mereka sendiri melalui pengelolaan pembiayaan berbasis sekolah, yang mengalihkan kendali atas alokasi dan penggunaan anggaran kepada sekolah. Untuk sepenuhnya mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah, sekolah juga diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Pengelolaan pembiayaan perlu dilaksanakan dengan hati-hati, tekun, dan patuh terhadap peraturan terkait ketika menerapkan manajemen berbasis sekolah. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) serta berbagai bentuk dan sumber pendanaan sekolah semuanya termasuk dalam gagasan pengelolaan pembiayaan berbasis sekolah. Untuk menjamin seluruh dana yang diterima sekolah benar-benar digunakan secara terorganisir, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, maka RAPBS dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kata kunci: Manajemen, Pembiayaan, Berbasis Sekolah

1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan standar pendidikan nasional, Manajemen Berbasis Pendidikan (MBP) merupakan pendekatan desentralisasi di sektor pendidikan yang memberikan otonomi untuk merancang, melaksanakan, dan menilai manajemen partisipatif di tingkat sekolah. Keputusannya didasarkan pada tujuan, potensi, inisiatif, dan prioritas kemandirian sekolah. Kolaborasi antara orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial lainnya seperti dunia usaha atau dunia industri diutamakan dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS. Manajemen sekolah kolaboratif, yang pada tahap selanjutnya sering disebut manajemen berbasis sekolah atau manajemen berbasis pendidikan, merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai komponen (MBP).

Sekolah harus dapat merencanakan, melaksanakan, menilai, dan melaporkan pengelolaan uang secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka mematuhi Manajemen Berbasis Pendidikan (MBP). Agar pemangku kepentingan tetap mendapat informasi mengenai kemajuan penetapan pengelolaan pendanaan di sekolah, sekolah dapat

Received: Agustus 19, 2024; Revised: September 20, 2024; Accepted: Oktober 31, 2024;

Online Available: November 16, 2024;

menyampaikan laporan berkelanjutan. Peningkatan kepercayaan dan keyakinan pemangku kepentingan terhadap otoritas dan reputasi sekolah dengan tata kelola yang baik dan baik dapat dicapai melalui pengelolaan pembiayaan sekolah yang transparan (Astuti & Haryanti, 2021).

Gagasan “manajemen berbasis pendidikan”, atau “MBP”, memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengelola pendanaannya secara efektif dan ekonomis guna meningkatkan prestasi siswa. Pengelolaan pembiayaan yang baik diperlukan karena diyakini bahwa pengelolaan keuangan sekolah yang efisien dan efektif akan menghentikan kesalahan, kebocoran, dan variasi penggunaan dana dari rencana dan tujuan awal (Yunis Hidayati & Nik Haryanti, 2022).

Salah satu alat yang berkontribusi langsung terhadap efektivitas dan efisiensi manajemen sekolah adalah pembiayaan. Elemen lain dalam meningkatkan standar pengajaran di sekolah adalah pendanaan. Pengelolaan keuangan yang tidak baik seringkali menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga menyebabkan kegiatan belajar mengajar di bawah standar. Standar yang dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan sekolah dijelaskan dalam artikel ini. Standar-standar tersebut menjadi petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian kepustakaan yang menggunakan buku-buku dan literatur lain sebagai objek utamanya (Fitri & Haryanti, 2020). Data perpustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan, dan diperiksa merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dalam penelitian kepustakaan. Tinjauan pustaka ini tidak mencakup pengujian empiris tambahan apa pun. Karena data disediakan dalam bentuk tertulis, pengolahannya harus metodis dan ringkas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Sekolah

Dalam lingkungan pendidikan, biaya pendidikan berfungsi sebagai landasan empiris untuk merangkum aspek keuangan sekolah. Biaya satuan per siswa dapat digunakan untuk menganalisis seberapa efisien sekolah menggunakan sumber daya keuangannya dan menghasilkan pekerjaannya. Biaya rata-rata per siswa, atau biaya satuan per siswa, ditentukan dengan membagi jumlah total yang dikeluarkan untuk pendidikan dengan jumlah siswa yang terdaftar di institusi tersebut untuk jangka waktu tertentu. Untuk mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan dalam upaya meningkatkan standar pendidikan, akan berguna jika kita mengetahui

satuan pengeluaran per siswa berdasarkan jenis dan tingkat pendidikan.(Fattah & Gautama, 2017). Manajemen juga berarti ketrampilan dan kemampuan untuk memperoleh hasil melalui kegiatan bersama orang lain dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan (Arsyad, 2003). Jika berkaitan dengan pendidikan, maka manajemen sekolah adalah proses atau tindakan yang dilakukan individu di dalam sekolah dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk memenuhi tujuan pendidikan lembaga, serta sumber daya keuangan yang tersedia untuk membiayai lembaga tersebut.

Pengelolaan keuangan dan pembiayaan adalah salah satu bidang yang menjadi fokus sekolah dalam model ini. Karena sekolah adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan siswanya, maka desentralisasi alokasi dan penggunaan dana untuk mendukung inisiatif pendidikan harus diserahkan kepada sekolah. Untuk sepenuhnya mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah, sekolah diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan.

Penganggaran dan pembiayaan sekolah pada dasarnya adalah tindakan pengelolaan keuangan yang mencakup pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, maka pengelolaan pembiayaan sekolah merupakan komponen penting dari keseluruhan proses pengelolaan pendidikan dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dalam pengelolaan keuangan sekolah terdapat serangkaian tugas yang terdiri dari pengembangan program sekolah, memperkirakan anggaran dan pendapatan yang diperlukan untuk melaksanakan program, serta penggunaan anggaran sekolah.

B. Ayat ayat pembiayaan

Allah Swt. menjelaskan dalam Alquran Surat Al-Mujadilah/58: 12-13 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوِكُمْ صَدَقَاتٍ ۖ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemah: (12) Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu (ingin) melakukan pembicaraan rahasia dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum (melakukan) pembicaraan itu. Hal itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Akan tetapi, jika kamu tidak mendapatkan (apa yang akan disedekahkan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(13) Apakah kamu takut (menjadi miskin) jika mengeluarkan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan rahasia dengan Rasul? Jika kamu tidak melakukannya dan Allah mengampunimu, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

C. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan Berbasis Sekolah

1. Biaya Langsung (*direct cost*)

Biaya yang ditanggung sekolah, siswa, dan keluarganya dalam menyelenggarakan pendidikan disebut biaya pendidikan langsung. Penyelenggaraan proses belajar mengajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, gaji guru dan staf, buku, peralatan, dan biaya pemeliharaan semuanya dibiayai melalui biaya langsung, atau pengeluaran tunai langsung.

Selain pengeluaran yang berkaitan dengan administrasi sekolah, perlengkapan kantor, dan pemeliharaan efisiensi dan kualitas pengajaran, sebagian besar pengeluaran langsung ditanggung oleh sistem pendidikan itu sendiri. Berikut beberapa biaya tambahan yang dikeluarkan: (1) ruangan, alat peraga, perlengkapan laboratorium, alat peraga, pakaian praktek; (2) transportasi sekolah; (3) buku pegangan guru dan buku perpustakaan; (4) biaya UKS dan biaya organisasi penyuluhan; dan (5) biaya untuk mendatangkan guru dan sumber daya tambahan. (Noval & Irawan, 2019).

2. Biaya Tidak Langsung (*indirect cost*)

Biaya tidak langsung adalah biaya hidup yang ditanggung oleh keluarga atau anak-anak yang bersekolah; pengeluaran tersebut tidak digunakan secara langsung oleh lembaga pendidikan; sebaliknya, biaya tersebut ditanggung oleh keluarga, anak-anak, atau mereka yang menanggung biaya siswa menghadiri kelas. Biaya hidup yang menjaga kelancaran pendidikan dikenal sebagai biaya tidak langsung. Misalnya saja biaya perjalanan, perumahan, makan sehari-hari, perawatan kesehatan, dan studi tambahan (Noval & Irawan, 2019).

D. Sumber Pembiayaan Pendidikan Berbasis Sekolah

Pendanaan pendidikan di tingkat sekolah (unit pendidikan) berasal dari biaya siswa, sumbangan masyarakat, dan subsidi dari pemerintah federal, negara bagian, dan lokal. Berdasarkan data Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sekolah swasta mendapatkan pendanaan dari yayasan atau siswa, sedangkan sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah ditanggung oleh pemerintah federal. (Supriadi, 2006). Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu:

1. Sumber utama pendanaan pendidikan adalah pendapatan umum yang dikumpulkan oleh pemerintah. Ini mencakup semua bentuk pendapatan pemerintah, termasuk pajak, pinjaman dari pemerintah, dan bantuan luar negeri. Perwakilan pemerintah pusat atau daerah menetapkan jumlah tersebut setelah mempertimbangkan prioritas tertentu..

2. Sumber pendanaan khusus untuk pendidikan, seperti hibah atau pinjaman dari organisasi seperti UNICEF atau UNESCO, atau pajak khusus yang seluruh atau sebagian pendapatannya digunakan untuk mendanai pendidikan.
3. Biaya sekolah atau biaya lainnya, artinya kontribusi orang tua langsung ke sekolah tergantung parameter yang ditentukan.
4. Pemerintah juga membantu sekolah swasta melalui cara-cara berikut: (a) dengan mempekerjakan guru negeri; (b) dengan menawarkan pendanaan khusus untuk pembangunan fasilitas dan peralatan; dan (c) dengan menyediakan pendanaan rutin untuk kebutuhan. Pendanaan reguler dapat berbentuk hadiah, hibah, atau subsidi. Meskipun bantuan dapat diberikan berdasarkan jumlah siswa, subsidi diberikan untuk menutupi seluruh biaya sekolah reguler, dan sumbangan dapat diberikan secara tidak sengaja untuk menutupi sebagian kecil kebutuhan rutin.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas mengatur bahwa semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan keluarga peserta didik, bertanggung jawab atas pengadaan dan pemanfaatan sumber daya pendidikan dalam rangka mendorong pemberian kesempatan belajar bagi seluruh penduduk. Pendidikan di sekolah didanai oleh tiga sumber: (1) hibah pemerintah; (2) biaya kuliah dan biaya; dan (3) kontribusi dunia usaha dan masyarakat. (Heryati & Muhsin, 2014).

E. Standar Pembiayaan Pendidikan Berbasis Sekolah

Standar yang mengatur tentang komponen dan jumlah belanja operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun dikenal dengan standar pendanaan pendidikan. Biaya yang terkait dengan pengoperasian satuan pendidikan sudah termasuk dalam dana pendidikan yang diperlukan untuk mendukung operasional tersebut, sehingga memungkinkan terselenggaranya pengajaran secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan standar pendidikan nasional. (Mulyasa, 2006). Menyusun pembiayaan dalam pendidikan memiliki standar yang harus di pedomani, secara garis besar standar pembiayaan pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Biaya investasi, operasional, dan pengeluaran pribadi merupakan pendanaan pendidikan.
2. Harga pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, dan modal kerja tetap semuanya termasuk dalam biaya investasi.
3. Biaya pendidikan yang harus dikeluarkan siswa agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara konsisten dan berkesinambungan termasuk dalam biaya pribadi.
4. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi: (1) gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh tunjangan yang melekat pada gaji; (2) bahan atau peralatan habis pakai; dan

(3) biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa tenaga air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan infrastruktur, upah lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.

5. Standar biaya penggunaan satuan pendidikan ditetapkan melalui Peraturan Menteri berdasarkan pendapat BSNP (Heryati & Muhsin, 2014).

Anggaran pendapatan dan anggaran belanja untuk mencapai tujuan pendidikan merupakan dua sisi anggaran biaya yang saling berhubungan dan menjadi kriteria pendanaan pendidikan yang telah disebutkan sebelumnya. Anggaran pendapatan adalah jumlah uang yang diterima sekolah secara rutin dari beberapa sumber resmi setiap tahunnya. Sekolah dasar negeri sering kali mempunyai sumber anggaran pendapatan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua dan sumber lainnya. Sedangkan anggaran belanja pokok tahunan adalah sejumlah uang yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Mayoritas komponen yang menentukan berapa banyak uang yang dibelanjakan sekolah berbeda dari satu sekolah ke sekolah lainnya dalam hal kuantitas dan persentase. (Fattah & Gautama, 2017).

Pengeluaran sekolah dapat diklasifikasi menjadi beberapa pos berdasarkan pendekatan unsur biaya (*ingredient Approach*). Hal-hal tersebut antara lain: (1) biaya pelaksanaan pembelajaran; (2) biaya administrasi sekolah; (3) pemeliharaan prasarana sekolah; (4) kesejahteraan pegawai; (5) administrasi; (6) pengembangan teknis pendidikan; dan (7) pengumpulan data. (Fattah & Gautama, 2017).

Keuangan mempunyai pengaruh penentu yang signifikan terhadap bagaimana pendidikan dilaksanakan di sekolah dan merupakan komponen integral dalam metode Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Cara pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah sangat dipengaruhi oleh keadaan keuangannya. Dengan kata lain, setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sekolah memerlukan biaya yang cukup dan layak. Pengelolaan elemen pendanaan yang efektif ini diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia saat ini dalam mendukung pencapaian tujuan akademik sekolah.

Umumnya sekolah selalu dihadapkan pada dilema kekurangan dana. Dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah mempunyai kebebasan untuk mencari dan mengajukan berbagai sumber pembiayaan berdasarkan kebutuhannya sendiri. Selain pengelolaan biaya, otonomi sekolah memberikan kebebasan bagi lembaga pendidikan untuk mencari sumber pendanaan dari luar guna meningkatkan standar pengajaran.

Untuk membiayai pendidikan, sekolah harus mampu merencanakan, mengelola, menilai, dan melaporkan keuangan sekolah secara efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat

dan pemerintah. Pengelolaan seluruh sumber daya keuangan, termasuk sumber daya yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan dana untuk proyek atau sumber daya yang secara langsung atau tidak langsung membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dikenal sebagai manajemen pembiayaan sekolah.

Tindakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, dapat dipahami sebagai pengelolaan keuangan sekolah. Pengembangan program sekolah, memperkirakan anggaran dan pendapatan yang diperlukan untuk menyelesaikan program, mengesahkan dan memanfaatkan anggaran sekolah adalah beberapa tugas yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sekolah. (Heryati & Muhsin, 2014).

Beberapa kegiatan manajemen keuangan, yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. (Heryati & Muhsin, 2014).

F. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah

Pengelolaan pembiayaan harus dilaksanakan dengan peraturan dan diawasi secara terbuka, efektif, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai hal ini, kepala sekolah harus melakukan inovasi dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), mempertimbangkan opsi pendanaan, dan menunjuk bendahara yang akan mengawasi pembukuan dan akuntabilitas keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Untuk menjamin seluruh dana yang diterima sekolah benar-benar digunakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka RAPBS dibuat dengan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku (Murtadlo, 2016).

Langkah pertama dalam penyusunan RAPBS adalah mengkaji perubahan peraturan perundang-undangan dan tuntutan peningkatan mutu pendidikan yang dapat membuka peluang. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi sangat strategis untuk memberikan kewenangan kepada kepala sekolah (otonomi sekolah) dalam mengelola keuangan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. (Fattah & Gautama, 2017). Satu hal yang harus diingat ketika menerapkan metode RAPBS adalah analisis SWOT bukanlah tugas yang mudah. Gagasan ini harus dipahami sebelum pengelolaan pendidikan di sekolah dapat diterapkan, dan diperlukan kemahiran kepala sekolah dalam bidang keuangan dan administrasi sekolah; Kepala sekolah harus mempunyai strategi yang tinggi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Mereka perlu memiliki visi keuangan strategis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek agar dapat memanfaatkan biaya dari berbagai sumber secara efisien.

Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis sekolah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber penting, seperti sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki wawasan luas terhadap dinamika sosial masyarakat, menyediakan informasi yang akurat dan tepat untuk mendukung pengambilan keputusan, menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat guna. dalam perencanaan, dan ketersediaan dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (Arwildayanto et al., 2017).

Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk memandu organisasi dalam menjalankan operasionalnya serta sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Selain itu, anggaran berfungsi sebagai alat interpretasi dengan memperkirakan pendapatan dan pengeluaran, sehingga memungkinkan Anda mengevaluasi jumlah uang yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengajaran di sekolah (Sailan, 2015).

Konsep anggaran berimbang yang menyatakan bahwa rencana pendapatan dan belanja harus seimbang agar tidak ada anggaran pendapatan yang dikurangi, digunakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Anggaran yang berimbang akan membuat kehidupan sekolah lebih stabil dan kuat secara finansial, sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan, pengelolaan keuangan harus dipusatkan pada bendahara sekolah. (Fattah & Gautama, 2017).

Langkah-langkah yang terlibat dalam pelaksanaan suatu rencana adalah sebagai berikut: (a) menginventarisasi rencana-rencana yang perlu dilaksanakan; (b) menyusun rencana sesuai skala prioritas pelaksanaannya; (c) mengidentifikasi program kerja dan rincian program; (d) menilai apakah rincian program perlu dilaksanakan; (e) menghitung dana yang diperlukan; dan (f) mengidentifikasi sumber dana untuk pembiayaan rencana tersebut (P., 2015).

Rencana ini kemudian diputuskan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) setelah dibahas dengan komite dan pejabat sekolah. Setiap anggaran yang dikembangkan harus merinci, dengan mengidentifikasi sumber dana sebelumnya, apakah rencana anggaran yang akan dilaksanakan merupakan sesuatu yang baru atau kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya (Budaya, 2017).

Setiap anggaran yang dibuat untuk kegiatan yang berhubungan dengan sekolah minimal harus mencakup enam hal berikut: (1) informasi tentang rencana kegiatan, seperti target, uraian rencana, penanggung jawab, dan rencana baru atau rencana yang sedang berjalan; (2) rincian program dan program kerja; dan (3) deskripsi program. (3) data mengenai permintaan, khususnya jumlah dan jenis produk dan jasa yang dibutuhkan, (4) informasi mengenai kebutuhan harga satuan dan total biaya yang diperlukan untuk memenuhi jumlah kebutuhan, (5) total anggaran, yang mencakup keseluruhan anggaran untuk seluruh rencana kegiatan serta

total anggaran untuk setiap detail program. (6) Sumber dana, yaitu total sumber dana untuk mendukung pembiayaan program (Saihu, 2020).

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), antara lain: (a) pihak sekolah; (b) orang tua siswa dalam komite sekolah; (c) dinas pendidikan/kabupaten kota; dan (d) pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing, masing-masing konstituen tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam operasional sekolah (Sa'adah & Satria Budi, 2021).

Hal-hal yang perlu dilakukan sekolah untuk mengubah RAPBS menjadi APBS adalah sebagai berikut: Sekolah dan pengurus BP3/komite sekolah menyiapkan RAPBS; (2) Setelah disusun, RAPBS disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapat persetujuan. (3) RAPBS ditinjau oleh pemerintah di Dinas Pendidikan melalui pengawas, kepala subbagian keuangan, kepala subbagian PRP, atau subbagian lain yang terkait. Setelah dilakukan penyesuaian, RAPBS kemudian dikembalikan ke sekolah. (4) Sekolah bertemu dengan komite sekolah atau BP3, (5) RAPBS diterima sekolah setelah mendapat persetujuan dalam rapat anggota BP3 atau komite sekolah, (6) Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, RAPBS diubah namanya menjadi APBS. (7) APBS yang telah disahkan dikembalikan kepada sekolah dan dijadikan pedoman dan acuan pembiayaan sekolah. (8) Bupati/Walikota menerima rekapitulasi APBS, dan (9) Dinas Pendidikan Provinsi menerima rekapitulasi APBS. (Fattah & Gautama, 2017).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu bidang fokus manajemen berbasis sekolah. Dalam pengelolaan pembiayaan berbasis sekolah, sekolah diberikan kewenangan untuk menilai kebutuhan mereka sendiri, yang pada gilirannya mentransfer alokasi dan penggunaan anggaran ke sekolah untuk tujuan mendanai kegiatan pembelajaran. Untuk sepenuhnya mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah, sekolah diperbolehkan untuk terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Sekolah mempunyai kebebasan untuk mencari dan menggunakan sumber pendanaan yang berbeda berdasarkan kebutuhannya guna meningkatkan standar pengajaran. Keuangan mempunyai pengaruh penentu yang signifikan terhadap bagaimana pendidikan dilaksanakan di sekolah dan merupakan komponen integral dalam metode Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Cara pelaksanaan program belajar mengajar di sekolah sangat dipengaruhi oleh situasi keuangan mereka. Dengan kata lain, semua upaya pendidikan yang dilakukan oleh sekolah memerlukan pendanaan yang cukup dan tepat.

Pengelolaan komponen keuangan yang efektif ini diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia saat ini dalam mendukung pencapaian tujuan akademik sekolah.

Pengelolaan pembiayaan harus dilaksanakan dengan peraturan dan diawasi secara terbuka, efektif, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai hal ini, kepala sekolah perlu menggunakan daya cipta dalam mencari sumber pendanaan dan memilih bendahara yang akan mengawasi pembukuan dan akuntabilitas keuangan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait. Gagasan pengelolaan pembiayaan berbasis sekolah meliputi macam-macam pembiayaan sekolah, sumber pembiayaan sekolah, standar pengelolaan pembiayaan sekolah, dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Untuk menjamin seluruh dana yang diterima sekolah benar-benar digunakan secara tertib, efektif, dan efisien, maka RAPBS dibuat dengan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Arsyad, A. (2003). *Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan & Eksekutif, Manajemen Strategik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.*
- Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 110, Issue 9). Widya Padjadjaran.
- Astuti, Y. D., & Haryanti, N. (2021). Media Pembelajaran Video Produk Kreatif dalam Pembuatan Softcase Laptop Produk Kreatif di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 6(1), 60–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jrpe.v6i1.5332>
- Budaya, B. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Dasar yang Efektif. *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 18(1), 42–59.
- Fattah, N., & Gautama, B. P. (2017). Penerapan Biaya Pendidikan Berbasis Activity-Based Costing dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Universitas Pendidikan Indonesia. *Mimbar Pendidikan*, 2(1).
- Fitri, A. Z., & Haryanti, N. (2020). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, Mixed method dan Research and Development*. Madani Media.
- Heryati, Y., & Muhsin, M. (2014). *Manajemen sumber daya pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.*
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum yang disempurnakan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 51.
- Murtadlo, M. (2016). Strategi Pembiayaan Pendidikan Pada Madrasah Swasta Unggulan. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 14(1), 97–116.

<https://doi.org/10.32729/edukasi.v14i1.14>

- Noval, A., & Irawan, I. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Swasta: Studi Kasus di MTs. Wihdatul Fikri Kab. Bandung. *Manajemen Pendidikan*, 14(1), 73–81.
- P., F. W. (2015). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4).
- Sa'adah, L. R., & Satria Budi, M. H. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Plus Al Hikmah Kab. Kediri. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(2), 99–117.
- Saihu, S. (2020). Pendidikan Islam Di Era Pluralitas Agama Dan Budaya: Sebuah Kajian Resolusi Konflik Melalui Model Pendidikan Plrualisme. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 317–330.
- Sailan, M. (2015). Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 10. <https://doi.org/10.26858/jiap.v2i1.869>
- Supriadi, D. (2006). *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*.
- Yunis Hidayati, & Nik Haryanti. (2022). Implementasi Kebijakan Pengawas Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Man 2 Tulungagung. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 1(1), 49–52. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v1i1.21>